



RINGKASAN

TIARA SYIFADIA AZHAR. Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kota Bogor. *Registration Procedure of Mortgage Rights and Contribution to Non-Tax State Revenue at Kantor Pertanahan Kota Bogor*. Dibimbing oleh SLAMET SOESANTO dan AULIA HIDAYATI.

Pendapatan negara umumnya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sedangkan penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengenaan PNBP berlaku atas objek pemanfaatan sumber daya alam, objek pelayanan, objek pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, objek pengelolaan barang milik negara, objek pengelolaan dana, dan objek hak negara lainnya.

Dalam pengenaan PNBP objek pelayanan terdapat PNBP yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan salah satunya yaitu pelayanan pendaftaran hak tanggungan. Pelayanan pendaftaran hak tanggungan diatur di dalam prosedur pendaftaran mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan. Proses pelayanan ini dilakukan di Kantor Pertanahan setempat di wilayah masing-masing di mana lokasi suatu objek tanah berada.

Hak atas tanah merupakan salah satu penjaminan pelunasan utang yang nilainya sangat tinggi dan menjanjikan. Segala perbuatan hukum terkait pertanahan harus diketahui oleh Kantor Pertanahan, salah satunya yaitu lahirnya hak atas tanah yang ditanggungkan untuk pelunasan utang tertentu.

Laporan tugas akhir ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kota Bogor selama dua bulan sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai 29 Maret 2022. Kantor Pertanahan Kota Bogor merupakan salah satu kantor pertanahan yang berkedudukan di Kota Bogor dan menangani segala permasalahan administrasi dan pelayanan pertanahan dari 6 kecamatan dengan 68 kelurahan di lingkup Kota Bogor, termasuk pelayanan pendaftaran hak tanggungan. Dari pelayanan tersebut dikenakan tarif pembayaran PNBP sesuai dengan PP Nomor 128 Tahun 2015.

Prosedur pendaftaran hak tanggungan dan kontribusinya terhadap PNBP dijelaskan di bab pembahasan. Tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini yaitu wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Laporan tugas akhir ini bertujuan menguraikan pelaksanaan, kendala, dan sistem pengendalian internal dari prosedur pendaftaran hak tanggungan serta menguraikan kontribusi PNBP hak tanggungan terhadap penerimaan PNBP periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Kata kunci: Hak Tanggungan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Prosedur